

**PERAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
PAPUA BARAT (DPRPB)  
DALAM PELAKSANAAN SOSIALISASI PERATURAN  
DAERAH DI PROVINSI PAPUA BARAT**

Fitrah Aditama Azis  
NPP. 29.1878

*Asdaf Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat  
Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah*

Email: [fitrahazis052@gmail.com](mailto:fitrahazis052@gmail.com)

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** *The Secretary of the West Papua People's Representative Council (DPRPB) is a provincial-level regional device organization tasked with providing services to DPRPB members, one of its duties is to support the implementation of the duties and functions of the DPRPB. Socialization of regional regulations is one of the mandatory activities that must be held by the DPRPB in meeting the requirements for the formation of a regional regulation. Socialization of regional regulations is one of the most important activities where the implementation of sosilaization of regional regulations aims to introduce and explain the implementation of a newly established regional regulation.* **Purpose:** *This research aims to find out more about the role of the DPRPB Secretariat in the implementation of regional regulatory socialization activities.* **Method:** *The theory used in this research is role concept theory according to Soerjono Soekanto (2012: 213) using qualitative approaches and descriptive research methods. Data retrieval is carried out by interview data collection techniques, observation, and documentation.* **Hasil/Temuan:** *The results of this study show that the implementation of regional regulatory socialization activities carried out by the DPRPB secretariat has been implemented properly. This is seen from the implementation of activities that are in accordance with the role of the DPRPB Secretariat and in the implementation of the socialization of regional regulations, staff can overcome various problems that occur so that the implementation of regional regulatory socialization activities can be carried out properly.* **Conclusion:** *The role of the DPRPB Secretariat in the implementation of the socialization of regional regulations has been carried out properly, namely by following good administrative steps starting from the preparation, implementation, and evaluation processes that have been implemented properly. The DPRPB secretariat staff who are in charge of carrying out socialization activities have been equipped with various skills so that they can overcome problems that may arise in the field.*

**Keywords:** *Socialization, Role, Research*

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRPB) merupakan organisasi perangkat daerah tingkat provinsi yang bertugas memberikan pelayanan kepada anggota DPRPB salah satu tugasnya yaitu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRPB. Sosialisasi peraturan daerah merupakan salah satu kegiatan yang wajib yang harus diselenggarakan DPRPB dalam memenuhi syarat pembentukan suatu peraturan daerah. Sosialisasi peraturan daerah merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dimana pelaksanaan sosialisasi peraturan daerah bertujuan mengenalkan dan menjelaskan terkait pelaksanaan suatu peraturan daerah yang baru ditetapkan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam terkait peran Sekretariat DPRPB dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi peraturan daerah. **Metode :** Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Konsep Peran menurut Soerjono Soekanto (2012:213) dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode penelitian deskriptif. Pengambilan data dilakukan dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan :** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan kegiatan sosialisasi peraturan daerah yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRPB telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dilihat dari pelaksanaan kegiatan yang sudah sesuai dengan peran yang dimiliki Sekretariat DPRPB dan dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi peraturan daerah para staf dapat mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi sehingga pelaksanaan kegiatan sosialisasi peraturan daerah dapat terlaksana dengan baik. **Kesimpulan :** peran Sekretariat DPRPB dalam pelaksanaan sosialisasi peraturan daerah telah dilakukan dengan baik yaitu dengan mengikuti langkah-langkah administratif yang baik mulai dari proses persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi sudah dilaksanakan dengan baik. Staf Sekretariat DPRPB yang bertugas turun kelapangan melaksanakan kegiatan sosialisasi sudah dibekali berbagai keterampilan sehingga dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang mungkin akan muncul di lapangan. **Kata Kunci:** Sosialisasi, Peran, Penelitian

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Badan legislatif dalam menjalankan tugasnya yaitu menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat, haruslah merupakan orang-orang yang secara teratur memantau kebutuhan dan keperluan rakyatnya yang terpancar berupa aspirasi rakyat maka diperlukannya suatu kegiatan penjaringan aspirasi guna menghimpun permasalahan rakyat agar dapat ditindaklanjuti nantinya dalam bentuk peraturan daerah dan kebijakan pemerintah oleh karena itu penyerapan aspirasi rakyat ini menjadi sangat penting guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Penjaringan aspirasi ini juga sangat diperlukan para anggota dewan dalam membangun citranya di masyarakat sebagai wakil rakyat yang melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik kemudian mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan pada pemilu selanjutnya dapat terpilih kembali mewakili rakyat dan konstituennya.

Kepercayaan muncul dari pengalaman dua pihak yang sebelumnya berkerjasama atau berkolaborasi dalam suatu kegiatan atau organisasi. Bisa disimpulkan bahwa untuk membangun kepercayaan dibutuhkannya suatu jembatan penghubung dan kegiatan yang paling tepat dalam mempertemukan anggota dewan dengan rakyatnya yaitu dalam bentuk sosialisasi. Sosialisasi yang dilaksanakan DPRPB biasanya dilakukan dalam bentuk sosialisasi peraturan daerah yang diselenggarakan oleh anggota dewan sebagai pelaksanaan fungsi legislatif yang dimiliki oleh anggota DPRPB tepatnya dalam penyebarluasan peraturan daerah. Sosialisasi ini perlu dilakukan guna menginformasikan kepada masyarakat terkait peraturan daerah yang telah diterbitkan guna mengatasi permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil**

Sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak peraturan daerah yang disahkan hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban terkait fungsi legislasi di daerah dan setelah disahkan tidak sama sekali diimplementasikan, disosialisasikan, bahkan dokumennya pun sangat sulit untuk diakses sehingga dana yang digelontorkan demi pembuatan peraturan daerah yang jumlahnya tidaklah sedikit menjadi terkesan disia-siakan. Seperti yang dikutip dari laman berita PAPUAKITA.com yang diterbitkan pada tanggal 26 februari 2020 dengan judul berita “Bapemperda DPR Papua Barat Agendakan Sosialisasi Sejumlah Peraturan Daerah”, ketua Bapemperda DPR Papua Barat Karel Murafel mengatakan bahwa:

Terdapat sejumlah produk hukum daerah yang terdiri atas peraturan daerah khusus (Perdasus) maupun peraturan daerah provinsi (Perdasi) yang ditetapkan sejak 2014-2019. Akan tetapi sejumlah produk hukum itu belum disosialisasikan dengan baik.

Oleh karena itu sangat diperlukannya pelaksanaan kegiatan sosialisasi peraturan daerah untuk menginformasikan kepada masyarakat terkait peraturan-peraturan daerah yang telah ditetapkan agar peraturan daerah tersebut dapat dijalankan dan dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat yang menjadi sasaran peraturan daerah tersebut.

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis uraikan sebelumnya diatas maka penulis merumuskan pokok-pokok permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan sosialisasi peraturan daerah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Sekretariat DPRPB dalam menyelenggarakan kegiatan sosialisasi peraturan daerah yang diselenggarakan DPRPB di tinjau dalam bidang ketatausahaan?
2. Tantangan apa saja yang ditemui Sekretariat DPRPB dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi peraturan daerah yang diselenggarakan DPRPB?
3. Apa saja upaya yang ditempuh anggota Sekretariat DPRPB dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ditemui saat pelaksanaan kegiatan sosialisasi peraturan daerah yang diselenggarakan DPRPB?

## **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan pemaparan hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan atau memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Penelitian terdahulu diperlukan dalam meninjau penelitian yang akan dilaksanakan penulis dengan penelitian-penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya guna mendapat referensi keilmuan terkait penelitian yang akan dilaksanakan penulis. Penelitian terdahulu juga diperlukan sebagai pembeda antara penelitian yang dilaksanakan penulis dan penelitian lain yang telah dilaksanakan sebelumnya sekaligus sebagai pendukung pelaksanaan penelitian penulis yang

merupakan kajian lanjutan terhadap penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yaitu sebagai referensi ilmiah yang relevan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Penulis dalam menyusun skripsi menggunakan beberapa skripsi terdahulu yang bersinggungan dengan judul skripsi penulis dikarenakan belum adanya skripsi yang secara gamblang memiliki tujuan yang sama dengan skripsi yang disusun penulis. Penelitian terdahulu yang digunakan penulis yaitu: Sosialisasi Peraturan Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Fungsi Legislasi Anggota DPRD Provinsi Riau (Studi Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah Di Masa Pandemi Covid 19); Sosialisasi Politik Dan Komunikasi Politik Anggota Dewan Dalam Memberikan Pendidikan Politik Dan Menjaring Aspirasi Masyarakat (Studi Pada DPRD Kota Bandar Lampung Dari Partai Demokrat Masa Bakti 2009-2014); dan Peranan Sekretariat DPRD Dalam Mendukung Fungsi DPRD (Studi Di Sekretariat DPRD Kota Tomohon).

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis menyusun judul skripsi yang sangat berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan terkait peran Sekretariat DPRD ataupun terkait Sosialisasi Peraturan Daerah. Perbedaan paling menonjol dari Skripsi yang disusun penulis dengan penelitian-penelitian terdahulu lainnya yaitu terlihat dari tujuan dari Skripsi yang disusun penulis yaitu untuk mendeskripsikan peran dari Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah dan belum ada penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki tujuan penulisan yang sama dengan yang disusun oleh penulis. Sudut pandang yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini juga sangat berbeda dengan penelitian-penelitian lainnya yang sejenis dimana sudut pandang penulis dalam menyusun skripsi ini lebih spesifik kepada peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat dalam hal teknis pelayanan administrasi dalam pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah dan berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang bersifat lebih umum membahas terkait bagaimana kinerja atau peran Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah secara keseluruhan.

#### **1.5. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan peran dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat dalam pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah secara teknis khususnya dalam memberikan pelayanan administratif dalam pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah sehingga pembaca dapat lebih memahami bagaimana tahapan-tahapan teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah.

## **II. METODE**

Metode penelitian yang penulis pakai dalam pelaksanaan penelitian ini yaitu jenis penelitian kualitatif dimana penulis mengumpulkan data non-numerik yang memungkinkan penulis memahami proses sosial yang terjadi pada target penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan jika dilihat dari segi teknik atau cara pengumpulan data maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (Pengamatan), interview (wawancara), dokumentasi, dan gabungan ketiganya. Dalam penelitian yang dilakukan penulis, teknik pengumpulan data yang akan digunakan yaitu dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan model analisis data Bogdan dan Biklen. Menurut Bogdan dan Biklen (dalam Yusuf, 2017:403-407) terdapat tahap-tahap yang perlu diperhatikan yaitu:

- a. Dorong dan memotivasi diri dalam memutuskan mempersempit studi.
- b. Dorong dan paksa diri untuk memutuskan jenis studi.
- c. Kembangkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat analitis.
- d. Merencanakan sesi pengumpulan data dari temuan pada observasi.
- e. Buat banyak “komentar pengamat” tentang ide-ide yang muncul.
- f. Tulis memo untuk diri sendiri tentang hal yang dipelajari.
- g. Lakukan uji coba terhadap ide-ide dan tema-tema kepada informan.
- h. Mulailah mendalami kepustakaan saat masih dilapangan.
- i. Mainkanlah metafora, analogi dan konsep.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sosialisasi peraturan daerah merupakan salah satu dari tahapan pembuatan peraturan daerah tepatnya pada tahap penyebarluasan peraturan daerah. Sosialisasi peraturan daerah dilakukan dengan tujuan pertama, memberikan pemahaman kepada masyarakat tepatnya kepada sasaran peraturan daerah terkait Peraturan daerah yang telah atau akan ditetapkan kedua, untuk mengetahui respon dari masyarakat terkait peraturan daerah yang akan ditetapkan tersebut dan ketiga, mengumpulkan aspirasi dari masyarakat terkait peraturan daerah yang telah ditetapkan.

#### **3.1. Persepsi Peran**

Persepsi peran yang dimiliki sekretariat DPRPB dalam pelaksanaan sosialisasi peraturan daerah yaitu dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi sesuai dengan prosedur dan tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga pelaksanaan kegiatan lebih terstruktur dan terorganisir.

Sekretariat DPRPB dalam pelaksanaan Sosialisasi Peraturan daerah menerapkan beberapa tahapan yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahapan-tahapan tersebut diperlukan sebelum pelaksanaan sosialisasi peraturan daerah sehingga dalam pelaksanaan sosialisasi peraturan daerah dapat berjalan dengan terencana dan sistematis.

##### **3.1.1. Tahapan Persiapan**

Tahapan persiapan dalam penyelenggaraan suatu kegiatan merupakan suatu keharusan, tanpa adanya persiapan kegiatan tersebut tidak akan terencana sehingga tidak siap jika dalam pelaksanaan kegiatan tersebut terjadi suatu masalah. Namun, dengan adanya persiapan yang matang suatu masalah akan dengan mudah diatasi dan kegiatan tersebut dapat berjalan tanpa adanya hambatan.

Tahapan persiapan yang dilakukan anggota staf Sekretariat DPRPB dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi peraturan daerah yaitu dengan melakukan rapat dengan para staf yang akan melakukan kegiatan di lapangan hal ini sesuai dengan pernyataan salah satu anggota staf Sekretariat DPRPB Bapak Jefry Kondororiis selaku staf yang sering dikirim kelapangan dalam pelaksanaan sosialisasi peraturan daerah melalui wawancara dengan penulis pada tanggal 12 Januari 2022 yaitu:

“Dalam pelaksanaan sosialisasi peraturan daerah persiapan yang paling awal kita lakukan itu adalah rapat persiapan pelaksanaan kegiatan dimana kita kumpulkan seluruh staf yang akan turun ke lapangan untuk membantu pelaksanaan sosialisasi peraturan daerah untuk membahas pembagian kerja, waktu dan apa saja yang kita harus persiapkan sebelum turun ke lapangan dalam mempersiapkan kegiatan, dan bagaimana teknis pelaksanaan kegiatan sosialisasi nantinya.”

### **3.1.1.1. Persiapan Administratif**

Tahapan administratif yang diperlukan sebelum pelaksanaan Sosialisasi Peraturan daerah meliputi pembuatan surat pengantar, surat jalan dan surat perintah perjalanan dinas (SPPD) bagi staf atau anggota yang akan mendampingi anggota dewan turun kelapangan, surat undangan pelaksanaan kegiatan sosialisasi peraturan daerah kepada pemerintah daerah tempat pelaksanaan sosialisasi, surat pemberitahuan kegiatan sosialisasi peraturan daerah kepada para anggota dewan yang akan turun melaksanakan sosialisasi, dan daftar hadir peserta sosialisasi peraturan daerah. Syarat-syarat administratif perlu untuk dibuat sebagai salah satu syarat dalam pelaksanaan sosialisasi peraturan daerah sebagai bentuk bukti tertulis dalam pelaksanaan kegiatan, contohnya SPPD dimana staf yang bertugas turun kelapangan perlu memiliki SPPD agar dapat menerima uang biaya perjalanan dinas dimana rincian biaya perjalanan dinas tercantum dalam SPPD tersebut.

### **3.1.1.2. Persiapan Lokasi dan Akomodasi**

Anggota staf Sekretariat DPRPB dalam memperlancar jalannya acara sosialisasi peraturan daerah nantinya harus dilakukan persiapan-persiapan seperti penyiapan hotel atau penginapan, akomodasi perjalanan, lokasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi peraturan daerah, dan kebutuhan lainnya seperti makanan dan minuman. Namun dalam penerapannya terkadang anggota dewan telah menentukan sendiri hotel dan kebutuhan-kebutuhan lainnya sehingga anggota staf yang bertugas turun ke lapangan mendampingi anggota dewan harus dapat menyesuaikan dengan situasi yang terjadi dilapangan.

Menurut pernyataan Bapak Allan selaku salah satu staf yang sering turun kelapangan melakukan sosialisasi dalam wawancara pada tanggal 13 Januari 2022 bahwa:

“Koordinasi dengan anggota dewan yang akan turun ke lapangan itu sangat diperlukan supaya kita ketika turun langsung ke lapangan kita bisa menentukan persiapan-persiapan apa saja yang di butuhkan anggota dewan tersebut sehingga ketika datang ke lokasi pelaksanaan sosialisasi peraturan daerah kita tidak perlu terlalu banyak lagi mempersiapkan apa-apa saja yang di perlukan sehingga pelaksanaan kegiatan itu dapat berjalan dengan lancar.”

### **3.1.1.3. Persiapan Acara**

Persiapan acara yang dilakukan anggota staf Sekretariat DPRPB dalam pelaksanaan kegiatan sosialisai peraturan daerah yaitu diantaranya mempersiapkan peralatan-peralatan yang sudah menjadi tanggung jawab Sekretariat DPRPB dalam menunjang pelaksanaan sosialisasi peraturan daerah sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar.

Lebih lanjut terkait persiapan acara yang dilakukan sekretariat DPRPB terutama dalam penyediaan peralatan-peralatan yang menunjang pelaksanaan sosialisai peraturan daerah, Ibu Engelina Munafer, S.STP Selaku Kepala Sub Bagian Dokumentasi, Informasi dan Publikasi dalam wawancaranya pada tanggal 13 Januari 2022 pada pukul 12.18 beliau menyatakan bahwa:

“Sebelum staf pergi ke daerah tempat pelaksanaan sosialisasi peraturan daerah itu kami mempersiapkan peralatan-peralatan yang nantinya akan digunakan dalam pelaksanaan kegiatan sosialisai peraturan daerah peralatan-peralatannya itu antara lain baliho, spanduk, dan kamera yang kemudian akan dibawa oleh para staf yang nanti bertugas turun ke lapangan dan digunakan dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi peraturan daerah.”

### **3.1.2. Tahapan Pelaksanaan**

Tahapan pelaksanaan merupakan inti dari penyelenggaraan suatu acara dimana dalam tahapan pelaksanaan apa yang telah dilakukan dalam tahapan persiapan berguna agar pada tahapan pelaksanaan tidak menemui kendala. Oleh karena itu dalam tahapan pelaksanaan, apa-apa yang

telah disiapkan harus diperhatikan kembali sehingga persiapan yang dilakukan dapat dimanfaatkan dengan maksimal dan dapat mencegah atau mengatasi permasalahan yang kerap ditemui dalam pelaksanaan kegiatan.

Staf Sekretariat DPRPB sebagai unsur pelayanan dan pendukung terhadap anggota DPRPB dalam kegiatan tersebut harus terus ikut mendampingi anggota dewan selaku pelaksana sosialisasi. Staf Sekretariat DPRPB yang turun ke lapangan sebagai unsur pendukung ikut dalam pelaksanaan sosialisasi terutama pada bagian protokoler dan pendukung jika terjadi suatu masalah dalam proses pelaksanaan sosialisasi.

Pelaksanaan pendampingan yang dilakukan Sekretariat DPRPB dalam pelaksanaan sosialisasi peraturan daerah dilakukan dalam sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pendukung terhadap DPRPB. Pendampingan kepada anggota dewan dilakukan mulai dengan mendampingi anggota dewan sejak tiba di bandara, pelabuhan, atau tempat yang telah ditentukan sebelumnya hingga ke hotel atau langsung ketempat pelaksanaan sosialisasi peraturan daerah hingga kembali ke daerah asalnya.

Anggota staf Sekretariat DPRPB dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi peraturan daerah terkadang harus dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari para peserta acara dengan memberikan penjelasan yang jelas oleh karena itu para staf yang turun ke lapangan harus sudah mengerti tentang isi dari peraturan daerah yang disosialisasikan. Hal ini sangat penting dimana dengan memberikan penjelasan terkait isi dari peraturan daerah yang disosialisasikan kepada para peserta sosialisasi akan mengurangi kemungkinan terjadinya kekeliruan dalam penerapan peraturan daerah tersebut.

### **3.1.3. Tahapan Evaluasi**

Tahapan akhir dari pelaksanaan kegiatan sosialisasi peraturan daerah adalah tahapan evaluasi dimana tahapan evaluasi sangat dibutuhkan dalam menilai tingkat kesuksesan pelaksanaan kegiatan sosialisasi peraturan daerah sehingga dapat dilakukan perbaikan terhadap hal-hal yang menjadi kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi selanjutnya hal-hal yang menjadi penghambat atau gangguan dalam pelaksanaan kegiatan dapat ditanggulangi dan pelaksanaan kegiatan selanjutnya dapat berjalan lebih lancar. Oleh karena itu pelaksanaan evaluasi sangat diperlukan demi meningkatkan kualitas pelayanan kita dalam pelaksanaan kegiatan sehingga out come yang didapatkan lebih baik lagi.

## **3.2. Ekspektasi Peran**

Pelaksanaan tugas dan fungsi dengan baik tidak sepenuhnya menjadikan suatu kegiatan akan berjalan dengan lancar namun diperlukan juga berbagai keterampilan yang memungkinkan seorang dapat menjadikan kegiatan tersebut tetap berjalan dengan baik bahkan keterampilan-keterampilan ini yang terkadang memiliki peran yang penting dalam menjadikan kegiatan tersebut berjalan lancar. Keterampilan-keterampilan itu diantaranya yaitu kemampuan dalam berkomunikasi atau melakukan koordinasi dan kemampuan dalam menempatkan diri dalam pelaksanaan kegiatan, dimana kedua keterampilan ini dapat membantu mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi dilapangan.

### **3.2.1. Kemampuan Dalam Melakukan Koordinasi**

Staf Sekretariat DPRPB dalam melaksanakan tugasnya dilapangan harus terus berkoordinasi dengan sesama staf, pemerintah daerah maupun dengan anggota dewan. Koordinasi atau komunikasi memiliki peran yang penting dilapangan dalam menjaga agar kegiatan dapat tetap terlaksana dengan baik terutama ketika menemui suatu masalah. Staf Sekretariat DPRPB sebelum turun ke lapangan melaksanakan kegiatan haruslah melaksanakan rapat terlebih dahulu dengan sesama staf dalam rangka membangun komunikasi awal sekaligus untuk membagi tugas yang akan dilaksanakan dilapangan. Hal ini penting melihat dengan adanya komunikasi awal yang baik maka komunikasi-komunikasi selanjutnya akan dapat berjalan

dengan baik. Dalam rapat awal juga akan ditetapkan koordinator lapangan yang akan bertugas memimpin seluruh staf dalam pelaksanaan kegiatan.

Kemampuan dalam melakukan koordinasi atau komunikasi dalam pelaksanaan tugas sangat berguna dalam menghadapi permasalahan di lapangan walaupun telah dilakukan persiapan sebelumnya terkadang datang juga permasalahan yang tidak kita duga sebelumnya sehingga belum dilakukan persiapan untuk menghadapi permasalahan tersebut. Komunikasi juga memungkinkan kita menemukan penyelesaian masalah dari orang-orang yang tidak kita duga sebelumnya maka komunikasi sangat diperlukan walaupun dengan orang yang baru kita temui sekalipun karena kita tidak bisa menebak secara jelas dari mana bantuan bisa kita dapat.

### **3.2.2. Kemampuan Dalam Menempatkan Diri**

Pelaksanaan suatu kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan lain yang hanya melibatkan unsur pemerintahan ataupun swasta. Hal ini dikarenakan sifat masyarakat yang pada umumnya masih awam akan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah langsung kepada mereka oleh karena itu juga terkadang masalah yang muncul pada saat pelaksanaan kegiatan itu sangatlah beragam dan cukup rumit sehingga diperlukan kemampuan dalam menempatkan diri di lapangan kapan kita harus sangat ramah kepada masyarakat sehingga mereka lebih terbuka dan kapan kita harus dapat bersifat lebih tegas agar mereka mau mendengarkan kita.

Dalam mengatasi permasalahan di lapangan kemampuan menempatkan diri ini sangat berguna contoh kasusnya dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi masyarakat yang menghadiri rapat kurang kondusif sehingga banyak yang tidak memperhatikan isi dari sosialisasi yang dipaparkan. Maka kita selaku staf dokumentasi dapat membantu dengan menegur beberapa oknum masyarakat yang tidak memperhatikan jalannya pelaksanaan sosialisasi walaupun tugas dan fungsi kita bukan termaksud dalam menertibkan masyarakat namun kita harus dapat melaksanakan apa yang menurut kita dapat membantu jalannya kegiatan.

### **3.3. Konflik Peran**

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi peraturan daerah tidak selalu dapat berjalan dengan lancar terkadang terjadi permasalahan yang tidak dapat diduga sebelumnya sehingga tidak ada persiapan yang kita lakukan dalam menghadapi permasalahan tersebut dalam hal ini para staf Sekretariat DPRPB sebagai unsur pendamping dan pendukung kepada anggota dewan harus bisa sigap dalam menangani berbagai permasalahan yang muncul. Dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang tidak terduga seperti ini diperlukan kemampuan analisis yang baik sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi permasalahan yang terjadi.

Masalah yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi peraturan daerah biasanya muncul pada saat pelaksanaan pendampingan kepada anggota dewan dan pada saat pelaksanaan kegiatan sosialisasi peraturan daerah masalah-masalah tersebut yang sering menjadi perhatian yaitu permasalahan karena tidak hadirnya sasaran sosialisasi dan permasalahan karena sulit dijangkaunya lokasi kegiatan sosialisasi peraturan daerah.

#### **3.3.1. Tidak Hadirnya Sasaran Sosialisasi**

Masalah yang muncul pada pelaksanaan kegiatan sosialisasi peraturan daerah umumnya sama dengan masalah-masalah yang sering terjadi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan sosialisasi pada umumnya. Namun, ada juga masalah yang bisa menjadi masalah besar jika terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi peraturan daerah yaitu tidak hadirnya para peserta atau target sosialisasi. Permasalahan ini bisa menjadi masalah besar melihat keberhasilan pelaksanaan



sosialisasi peraturan daerah bergantung berapa banyak para pelaksana di daerah yang mengetahui dengan benar isi peraturan daerah.

Untuk mengatasi permasalahan ini diperlukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk kemudian dilakukan pemastian kepada para peserta sosialisasi peraturan daerah apakah yang menjadi penyebab tidak datangnya mereka dalam kegiatan kemudian membantu memberikan solusi baik dengan mengundur pelaksanaan kegiatan maupun dengan memberikan solusi-solusi lain sehingga pelaksanaan kegiatan sosialisasi tetap dapat terlaksana dengan baik. Namun, apabila peserta sosialisasi tetap tidak dapat datang ketempat pelaksanaan acara maka pilihan terakhir yaitu dengan mengundur pelaksanaan kegiatan.

### **3.3.2. Sulit Dijangkaunya Lokasi Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah**

Salah satu masalah yang sangat sering muncul pada saat pendampingan kepada para anggota dewan adalah masalah jalur transportasi yang buruk apalagi jika cuaca sedang tidak mendukung sehingga beberapa wilayah sangat sulit untuk dituju dikarenakan kondisi medan yang sangat tidak mendukung, permasalahan ini juga diakibatkan topografi wilayah di Provinsi Papua Barat yang sangat beragam mulai dari daerah pegunungan sampai kepulauan sehingga transportasi yang digunakan bukan hanya kendaraan darat namun juga harus transportasi laut maupun transportasi udara ditambah dengan pembangunan di Provinsi Papua Barat yang masih lambat.

Penting bagi para staf yang bertugas dilapangan untuk memiliki persiapan seperti nomor kontak beberapa hotel atau penginapan di daerah tersebut sehingga bisa dengan sigap mencarikan hotel atau penginapan untuk anggota dewan ketika terpaksa harus menginap di sekitar jalur yang akan dilalui.

### **3.4. Diskusi temuan Utama Penelitian**

Penulis dalam pelaksanaan penelitian menemukan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh Sekretariat DPRPB terutama dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi peraturan daerah telah dilaksanakan sesuai dengan peran sekretariat DPRPB yaitu dengan melalui tahapan persiapan, pelaksanaan dan evaluasi sehingga out put pelayanan yang di berikan sudah sesuai dengan standart yang diperlukan. namun, pelaksanaan sosialisasi peraturan daerah tidak selalu dapat berjalan dengan mulus sehingga diperlukan keterampilan yang memumpuni yang harus dimiliki staf Sekreariat DPRPB yang bertugas menjalankan pelayanan administrasi kegiatan di lapangan. Oleh karena itu masih banyak kekurangan yang masih harus di perbaiki untuk memberikan pelayanan yang lebih baik yaitu memperbaiki kualitas SDM, meningkatkan kedisiplinan SDM, dan menciptakan sistem pelayanan dengan lebih memanfaatkan teknologi.

Sosialisasi peraturan daerah merupakan salah satu dari tahapan pembuatan peraturan daerah tepatnya pada tahap penyebarluasan peraturan daerah. Sosialisasi peraturan daerah dilakukan dengan tujuan pertama, memberikan pemahaman kepada masyarakat tepatnya kepada sasaran peraturan daerah terkait Peraturan daerah yang telah atau akan ditetapkan kedua, untuk mengetahui respon dari masyarakat terkait peraturan daerah yang akan ditetapkan tersebut dan ketiga, mengumpulkan aspirasi dari masyarakat terkait peraturan daerah yang telah ditetapkan.

## **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitan dan analisis data yang telah dilakukan penulis terkait Peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRPB) Dalam Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan daerah di Provinsi Papua Barat pada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRPB) yang terletak di Kabupaten Manokwari yang dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022. Dari hasil penelitian penulis tersebut kesimpulan yang bisa penulis tarik sebagai berikut:

1. Peran Sekretariat DPRPB dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi peraturan daerah di Provinsi Papua Barat berdasarkan hasil penelitian penulis terbagi menjadi tiga tahapan pelaksanaan yaitu:
  - a. Tahapan Persiapan, pada tahapan persiapan Sekretariat DPRPB melakukan berbagai jenis persiapan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi peraturan daerah yaitu persiapan administratif, persiapan lokasi dan akomodasi dan persiapan acara.
  - b. Tahapan Pelaksanaan, pada tahapan ini Sekretariat DPRPB sebagai unsur pelayanan kepada DPRPB ikut dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi peraturan daerah sebagai bentuk dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRPB. Sekretariat DPRPB bertugas mempersiapkan beberapa sarana dan melakukan pendampingan kepada anggota dewan yang turun ke daerah melakukan sosialisasi peraturan daerah juga melakukan pendataan berupa absensi peserta kegiatan dan dokumentasi.
  - c. Tahapan Evaluasi, pada tahapan ini Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat memuat laporan evaluasi keuangan dan laporan evaluasi kegiatan yang kemudian akan dijadikan pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi peraturan daerah selanjutnya.

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi peraturan daerah yang dilakukan Sekretariat DPRD telah terlaksana dengan baik hal ini sesuai dengan realisasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi peraturan daerah pada tahun 2020 yang telah melampaui target yaitu sebesar 141%.

**Keterbatasan Penelitian.** Penulis dalam melaksanakan penelitian ini menemui beberapa keterbatasan penelitian yaitu sangat terbatasnya waktu penelitian, sumber data penelitian yang sangat terbatas, dan waktu pelaksanaan penelitian yang kurang tepat sehingga tidak dapat dilakukannya studi lapangan secara langsung.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis sadar jika pelaksanaan penelitian yang dilakukan penulis masih sangat kurang. Oleh karena itu penulis sarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melanjutkan penelitian terkait peran Sekretariat DPRPB dalam pelaksanaan sosialisasi peraturan daerah sebagai pembanding pelaksanaan kegiatan sosialisasi peraturan daerah saat ini dengan pelaksanaan kegiatan sosialisasi peraturan daerah kedepannya melihat perkembangan zaman yang sangat pesat memungkinkan munculnya inovasi-inovasi dan perkembangan dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi peraturan daerah. Penelitian tersebut patut dilakukan melihat tingkat pemahaman masyarakat dan Pemerintah Daerah di Provinsi Papua Barat masih sangat rendah.

## V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih terutama penulis tujukan kepada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRPB) beserta jajaran yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian dan pengalaman yang berharga juga ucapan terimakasih penulis tujukan kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu selama penelitian ini.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

Priadi, Martha Purnama, & Ina Ratnamiasih., 2018. Implementasi Human Capital Pada Pt. Telkom Indonesia Kantor Wilayah Usaha Telekomunikasi Bandung. Diss. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas,.

Moordiningsih, Faturachman, & Kim U., 2010. Trust to Politician: Indigenous Psychological Analysis. Laporan Penelitian: Universitas Gajah Mada.

Lahamit, S., 2021. Sosialisasi Peraturan daerah Dalam Rangka Optimalisasi Fungsi Legislasi Anggota DPRD Provinsi Riau (Studi Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan daerah di Masa Pandemi Covid 19). PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik.

Suharti, B., 2014. SOSIALISASI POLITIK DAN KOMUNIKASI POLITIK ANGGOTA DEWAN DALAM MEMBERIKAN PENDIDIKAN POLITIK DAN MENJARING ASPIRASI MASYARAKAT (Studi pada DPRD Kota Bandar Lampung dari Partai Demokrat Masa Bakti 2009-2014). *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya*.

RINDENGAN, B. R., Tulus, F., & Ruru, J. M., 2015. Peranan Sekretariat Dprd dalam Mendukung Fungsi Dprd (Studi di Sekretariat DPRD Kota Tomohon). *Jurnal Administrasi Publik*.

SYARI, S. S., 2015. Analisis Efektifitas Sosialisasi Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2011 Terhadap Pajak Hotel Khususnya Kamar Kos di Kota Padang (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).

